

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI MIMIKA PAPUA

Witrianto

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang

ABSTRACT

National development activities of a nation, theoretically an integral part of the international development will foster what is commonly called global governance. Therefore, the issues of economic and political increasingly difficult to solve in the frame or the mindset of the nation-state (nation-state). Economic problems and political faced by a country not only belong or be a burden borne by the country itself, but also be part of the economic problems and the politics of other countries. These problems become is international or global scale, in spite of growing and developing at the local level. PT Freeport Indonesia is located in Mimika Regency of Papua is one of the development projects that are not approved by the community. Disapproval of society, among others, triggered by the environmental impact caused by the mining project and the economic benefits are not so perceived by the natives for their project using the labor of migrants, causing dissatisfaction among the indigenous population which then triggered the conflict between natives with the settlers.

Keywords: *Development, Global Governance, Conflict*

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa, secara teoritis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut dengan *global governance*. Oleh karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-bangsa (*nation-state*). Persoalan-persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu negara bukan hanya menjadi milik atau menjadi beban tanggungan negara itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan-persoalan ekonomi dan politik negara-negara lain. Persoalan-persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau berskala global, kendati tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika Papua merupakan salah satu proyek pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat ini antara lain dipicu oleh dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek penambangan ini dan manfaat ekonomi yang tidak terlalu dirasakan oleh penduduk asli karena proyek ini lebih menggunakan tenaga kerja dari penduduk pendatang sehingga menimbulkan rasa tidak puas di kalangan penduduk asli yang kemudian memicu terjadinya konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.

Kata Kunci: *Pembangunan, Global Governance, Konflik*

A. PENDAHULUAN

Selama tiga dasawarsa pembangunan nasional di Indonesia (1970-1990-an) telah terjadi perubahan yang sangat pesat, sehingga memberi kesan bahwa keberhasilan pembangunan dapat diukur dari banyaknya proyek-proyek fisik yang dibangun. Pengorbanan faktor manusia dalam proses pembangunan dianggap wajar, karena dimasukkan sebagai “*cost*” yang harus dibayar demi keberhasilan pembangunan itu. Dengan kata lain, faktor-faktor sosial budaya telah diabaikan dalam proses pembangunan. Akhirnya, makna kesejahteraan direduksi hanya pada aspek fisik, yang diukur dari kenaikan pendapatan per kapita secara nasional sebagai indikator pertumbuhan yang dibanggakan pada saat itu.

Di balik itu, terdapat warga masyarakat di kawasan tertentu yang terkena dampak pembangunan, khususnya masyarakat yang berdekatan atau tergesur karena proyek. Bagi mereka kehadiran proyek justru menjadi beban, karena terlalu banyak perubahan yang belum siap mereka terima. Lebih-lebih bagi mereka yang tergesur, beban menjadi semakin berat karena di samping menerima dampak secara fisik, mereka juga mengembangkan pola-pola adaptasi di lingkungan baru yang dapat menimbulkan masalah. Contoh penting adalah persoalan yang dialami masyarakat Marunda (Jakarta Utara), yang terjadi sehubungan dengan dibangunnya proyek “Pusat Perkayuan Marunda” (Meutia Hatta, 1991).

Di samping dampak ekonomi, sosial, kebudayaan, dan psikologis berupa stress yang terungkap dari penelitian Meutia Hatta tersebut, dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berupa perubahan pola pergaulan antartetangga, menurunnya tingkat ketentraman penduduk dan makin kompleksnya peranan sosial masyarakat (Parsudi Suparlan, 1981). Temuan serupa juga diperoleh Sariyun (1980) dalam penelitiannya tentang pengaruh proyek industri besar terhadap masyarakat tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Pembangunan proyek *Liquid Natural Gas* (LNG) pada tahun 1996 ternyata menimbulkan dampak berupa konflik sosial, baik antara sesama penduduk asli, antara penduduk asli dengan pendatang, maupun antara sesama pendatang.

Ketiga penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin dekat jarak fisik dengan pusat kegiatan pembangunan, semakin banyak perubahan yang terjadi. Hal itu disebabkan meningkatnya intensitas pengaruh kegiatan ekonomi pasar yang dibawa serta dalam kegiatan pembangunan itu lebih kuat dan lebih besar daripada kekuatan yang ada dalam ekonomi pertanian yang bersifat subsistensi ataupun yang bersifat pasar lokal. Perubahan-perubahan yang demikian cepat itu dirasakan sebagai tekanan berat oleh penduduk lokal yang belum siap untuk mengambil bagian secara menguntungkan. Kegagalan menyesuaikan diri (*readjustment*) menyebabkan mereka mudah terpicu untuk melakukan gerakan-gerakan radikal atau tetap diam dengan memendam suatu persoalan.

Benih-benih konflik pembangunan di Indonesia mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an, ketika masyarakat mulai berani melakukan protes atau unjuk rasa terhadap rencana pembangunan proyek. Beberapa proyek yang diprotes pada saat itu antara lain, Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas (Jakarta), Waduk Kedung Ombo (Jateng), Waduk Nipah (Jatim), PLTA Danau Lindu (Sulteng), dan PT Freeport di Papua. Disamping itu, protes terhadap masalah

tanah akibat pembangunan juga terus meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di berbagai daerah.

Salah satu di antara sekian banyak proyek pembangunan yang tidak disetujui oleh masyarakat adalah proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Mimika Papua. Proyek ini ditentang oleh rakyat setempat sejak awal berdirinya (1970), dan terus berlangsung sampai sekarang. Perubahan sosial juga terjadi secara cepat di wilayah sekitar proyek, telah menimbulkan berbagai macam konflik dalam masyarakat, terutama antara pendatang dengan penduduk asli. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek membuat masyarakat tidak puas terhadap proyek dan pada kalangan masyarakat tertentu timbul keyakinan bahwa hanya melalui berbagai gerakan sosial, hubungan antara masyarakat dengan proyek dapat diperbaiki. Di samping itu, ada pula kelompok masyarakat yang lebih bersikap kompromistik, tidak menentang, tetapi berusaha menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Untuk memudahkan jalannya penulisan, beberapa hal penting perlu dikemukakan. Konflik yang terjadi dalam pembangunan masyarakat di Mimika Papua di satu sisi sebenarnya dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi suatu hal yang positif terhadap pembangunan. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Mengapa timbul konflik antara penduduk asli dengan PT Freeport Indonesia?
2. Mengapa konflik berlangsung lama atau berkepanjangan?
3. Bagaimana konflik yang ada tersebut dikelola sehingga berfungsi sebagai masukan yang berharga dalam pembangunan berkelanjutan?

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut di atas, dengan harapan, apabila latar belakang terjadinya konflik dan sebab-sebab terjadinya konflik yang berkepanjangan itu dapat terjawab, orang-orang yang terlibat di dalamnya berusaha mengurangi kepentingannya sehingga konflik-konflik pembangunan di kemudian hari dapat dicegah atau dikurangi.

Dari sudut pandang praktis, tulisan ini pada dasarnya ingin menjelaskan suatu gejala sosial yang dalam konsep sosiologi disebut gerakan sosial, baik dari segi struktur internal, proses terjadinya hubungan dengan gerakan politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang akademik, tulisan ini bermaksud untuk mengembangkan teori yang ada, dalam arti membangun teori dari bawah, tanpa melepaskan diri dari kerangka teori yang sudah ada.

Metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini terutama menggunakan studi kepustakaan. Data-data di peroleh dari berbagai buku dan tulisan yang mendukung tulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dipergunakan untuk melihat sejauhmana teori-teori konflik sosial yang ada dapat menjelaskan latar belakang munculnya sikap penduduk asli yang memprotes pembangunan proyek pertambangan di Kabupaten Mimika Papua.

Data yang telah diolah tersebut kemudian diinterpretasi untuk melihat sejauh mana hubungan antara kehadiran PT Freeport Indonesia di Mimika Papua dengan protes yang

dilancarkan penduduk asli yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan dengan tujuan supaya dapat lebih memahami berbagai gejala di tengah masyarakat yang dapat mengarah terhadap terjadinya konflik, sehingga dapat diambil langkah terbaik untuk mengelola konflik yang ada tersebut. Terakhir, semoga tulisan ini dapat pula memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia.

Perkembangan konflik ke protes, adalah ekspresi ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang mengabaikan perencanaan sosial dan keadilan. Oleh karena tidak puas dengan respon yang diberikan pemerintah, ditambah dengan perkembangan sosial politik di luar dan di daerah Mimika, menyebabkan tuntutan masyarakat makin berkembang.

Protes dapat dilakukan melalui kekerasan maupun damai. Tulisan-tulisan Sartono Kartodirdjo yang bertema protes atau pemberontakan petani memberikan konotasi bahwa protes petani sering dilakukan dengan kekerasan. Hal ini tergambar dalam tiga tulisannya tentang protes, yaitu: *Pemberontakan Petani Banten 1888* (1984), *Ratu Adil* (1984), dan *Protest Movement in Rural Java* (1973). Ketiga buku tersebut menggambarkan tentang protes-protes petani dengan kekerasan yang terjadi pada abad ke-19, pada saat pemerintah kolonial gencar melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pertanian/perkebunan.

Apa yang terjadi di Indonesia pada abad ke-19 terjadi pula di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Birma sebagaimana yang dipaparkan oleh Scott (1993) dalam bukunya yang berjudul *Perlawanan Kaum Tani*. Dari buku tersebut, terlihat bahwa bentuk-bentuk perlawanan kaum tani adalah “senjatanya orang-orang yang kalah”. Di dalam proses transformasi dari sistem ekonomi pra kapitalis memang banyak petani yang menjadi korban atau dikorbankan demi pertumbuhan dan globalisasi ekonomi.

Kenyataan di Mimika tidak jauh berbeda dengan pengalaman para petani di pedesaan Jawa pada masa kolonial itu. Para petani di pegunungan dan suku peramu di dataran rendah mengalami proses marginalisasi dan goncangan budaya yang hebat seiring dengan datangnya pemodal besar di bidang pertambangan yaitu PT Freeport Indonesia (PTFI). Kedatangannya bukan hanya tiba-tiba, tetapi juga membawa peradaban yang jauh berbeda dengan masyarakat asli sekitar proyek pertambangan. Proyek ini sangat dibanggakan oleh pemerintah/PTFI sebagai “pengekspor terbesar non-migas, pembayar pajak terbesar, dan salah satu investor terbesar di Indonesia” (*Freeport's Overview*, tanpa tahun).

Pernyataan itu sungguh kontras dengan kehidupan masyarakat yang tetap miskin, berada dalam sistem perekonomian tradisional (barter) dan ketertinggalan pendidikan. Oleh karena itu, maka dilakukanlah usaha untuk mengubah keadaan melalui protes. Akar protes adalah konflik, meskipun tidak semua konflik diwujudkan dalam bentuk protes. Konflik berkembang menjadi protes apabila ketidaksetujuan atau tingkat perbedaan antara yang diharapkan dengan yang senyatanya terlalu besar, atau ada ketidaksetujuan yang besar (*strong disagreement*). Bila konflik masih bersifat laten, maka protes adalah bentuk manifestasi dari konflik, sehingga konflik dapat dibaca dengan jelas.

Hasil kajian beberapa peneliti tentang pemberontakan petani membuktikan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah lanjutan dan mempunyai kesamaan-kesamaan dengan apa yang terjadi di Mimika. Dalam buku *Pemberontakan Petani Banten*, Satono Kartodirdjo hanya meneliti satu kasus untuk melukiskan kejadian pemberontakan dan menelusuri penyebabnya dalam studi tentang genesis gerakan. Pada buku *Ratu Adil dan Protest Movement in Rural Java*, Sartono menelaah beberapa contoh kasus. Sasarannya adalah untuk mengetahui isi ajaran “Ratu Adil” yang mampu menggerakkan masyarakat petani untuk melakukan pergerakan yang bersifat radikal.

Konflik radikal yang terjadi antara petani dengan pihak lain yang menganut sistem berbeda, juga merupakan cerminan adanya pertentangan antara “tradisi besar”, yakni model perilaku bagi manusia beradab, dan “tradisi kecil” yang dihayati dan hidup di kalangan petani yang kekurangan sumberdaya kultural. Pembangkangan “tradisi kecil” menurut Scott (1993: 90), berasal dari kenyataan bahwa dasar sosialnya, yaitu masyarakat petani, baik secara historis maupun kultural, terbentuk sebelum ada kota dan tradisi besarnya.

Penelitian yang dilakukan Sartono maupun Scott mempunyai kesamaan obyek, yakni masyarakat petani dan pencarian sebab-sebab timbulnya pergolakan atau gerakan sosial petani. Meskipun lokasinya berbeda, temuan-temuannya hampir sama, yakni adanya pengaruh modernisasi seiring dengan datangnya kolonialisme pada kawasan yang diteliti. Bedanya, Scott lebih menekankan pada analisis sosial ekonomi sebagai sumber konflik, sedangkan Sartono menyentuh aspek-aspek kepercayaan atau ideologi. Aspek yang belum tercakup dalam penelitian mereka adalah menyangkut kelangsungan gerakan dan efektivitasnya, serta kaitannya dengan upaya-upaya yang bersifat politis.

Studi lain yang cukup lengkap dilakukan oleh Fajar Pratikto (2000), tentang *Gerakan Rakyat Kelaparan* yang berlangsung di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini tidak hanya mencakup aspek sosial ekonomi, tetapi juga mencakup aspek politik. Latar belakang politik lebih menonjol dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Persamaannya dengan penelitian yang lain (Sartono dan Scott) adalah gerakan petani dilukiskan sebagai gerakan yang bersifat radikal, cenderung menggunakan kekerasan dalam melakukan aksinya.

Penelitian yang berlatarbelakang politik juga dilakukan oleh Robert Hefner (1999) yang mengambil lokasi pada masyarakat pegunungan Tengger. Penelitian politik yang terjadi di daerah ini adalah penampilan dari sebuah masyarakat suku, ketika berhadapan dengan penetrasi politik dan kultural dari “luar” dan intervensi negara melalui berbagai proyek pertanian. Dampaknya sangat serius terhadap tatanan dan proses transformasi pencarian identitas masyarakat yang bercorak egalitas.

Gerakan sosial di Mimika yang muncul seiring dengan hadirnya proyek pertambangan Freeport, mengingatkan kembali sejarah gerakan petani masa lalu yang resisten terhadap perubahan-perubahan radikal karena kebijakan pemerintah kolonial yang memaksa petani mengubah cara bertaninya. Perusahaan pertambangan Freeport dengan kekuatan teknologinya telah memacu perubahan sosial yang sangat cepat sehingga penduduk asli yang bermatapencarian

sebagai petani dan peramu, tidak mempunyai kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Akibatnya mereka melakukan protes, dan akhirnya berkembang menjadi gerakan terorganisir, bahkan tokoh-tokohnya banyak berkecimpung ke dalam gerakan politik.

Konflik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Selama masih ada kehidupan dan sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini. Konflik antarperorangan dan antarkelompok merupakan bagian dari sejarah umat manusia. Berbagai macam keinginan seseorang dan tidak terpenuhinya keinginan tersebut dapat juga berakhir dengan konflik. Perbedaan pandangan antarperorangan juga dapat mengakibatkan konflik. Selanjutnya, jika konflik antarperorangan tidak dapat diatasi secara adil dan proporsional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antarkelompok dalam masyarakat. Sebuah konflik sering berawal dari persoalan kecil dan sederhana. Perbedaan pendapat dan sikap termasuk ketidakinginan untuk menerima orang lain, dapat menyebabkan konflik antara seseorang dan yang lainnya.

Menurut William Chang dalam Murni Djamal (2003), konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai pendapat semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik menjadi saluran dari akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan orang lain. Sebuah ambisi yang kuat akan menyebabkan terjadinya konflik antarperorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Menurut Maswardi Rauf (2001), konflik adalah sebuah gejala yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relations*). Oleh karena masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.

Perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial terjadi karena adanya kecenderungan manusia untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri meskipun hal itu merugikan pihak lain. Nafsu manusia untuk memperoleh keuntungan tanpa mempedulikan pihak lain merupakan akar dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, bisa saja perbedaan pendapat mengenai manfaat dari hubungan sosial disebabkan oleh kesalahpahaman dan kekurangmengertian dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kasus ini lebih mudah diselesaikan karena dengan memberikan informasi yang tepat dan jelas konflik ini dapat diselesaikan. Yang menjadi masalah pelik adalah bila salah satu pihak (atau kedua pihak) berusaha dengan sengaja untuk mengambil keuntungan dari hubungan sosial secara tidak adil sehingga merugikan pihak lain. Bila ini terjadi, konflik akan sulit diselesaikan dan menjadi berlarut-larut.

Menurut Boulding (1963), konflik menunjuk pada suatu keadaan sebagai berikut:

“a situation of competition in which the parties are aware of the incompatibility of potential future positions and in which each party wishes to occupy a position that is incompatible with the wishes of the other”.

Sementara itu pengertian konflik sosial menunjuk pada suatu keadaan di mana partai-partai yang terlibat konflik itu dibentuk oleh suatu *agregasi* (pengelompokan besar) dari individu-individu, atau kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, beberapa komunitas dan kerumunan (*crowds*) di mana sesamanya berlangsung kompetisi yang ketat dan saling ingin memaksakan kehendaknya kepada kelompok lawan. Dalam hal ini, konflik yang terjadi dan berlangsung antarindividu seolah-olah diabaikan oleh karena peran individu seolah-olah anonim. Artinya, persaingan antarindividu tidak termasuk dalam konteks pembahasan konflik sosial. Dengan kata lain konflik sosial selalu berlangsung antarkelompok (partai) yang individu di dalamnya menjadi 'anonim' atau identitasnya terburai oleh identitas kelompok. Pada banyak kasus konflik kelompok (*group conflict*) dipakai untuk menunjuk pada pengertian konflik sosial (*social conflict*).

Konflik dalam kaitannya dengan masyarakat tidak dipandang sebagai masalah atau penyakit atau *social disorder*. Menurut **Park**, konflik bukan hanya mekanisme di mana kesadaran diri diperoleh, bahkan merupakan bagian yang turut membangun suatu Masyarakat. Konflik menurut Coser (1956) cenderung membawa integrasi suatu kelompok atau masyarakat. Konflik menurut Simmel adalah fenomena sosial dari proses interaktif dalam masyarakat (Sunario, 1999: 9):

‘Konflik adalah bentuk sosialisasi dalam masyarakat dengan asumsi bahwa tidak ada kelompok yang selalu dalam keadaan harmoni melainkan selalu dalam proses antara harmoni dan disharmoni, atau selalu terdapat faktor-faktor positif dan negatif yang membangun relasi kelompok. Pada derajat tertentu konflik sangat esensial dalam membentuk kelompok dan mempertahankan eksistensi kelompok.

Konflik dalam masyarakat dengan demikian memiliki fungsi sosial dan dalam derajat tertentu diperlukan bagi kelangsungan atau eksistensi kelompok. Fungsi konflik sosial dalam suatu masyarakat dalam derajat tertentu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memperkuat identitas kelompok dan sebagai pengikat kelompok.
2. Mempertahankan kelompok dengan menyediakan pranata *safety-valve*
3. Membangun dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan.
4. Membangun asosiasi dan koalisi (*Ibid.*).

Dalam suatu studi potensi konflik, sebagai dasar konsep untuk menggunakan fungsi 1 dan 2 sebagai pendekatan cukup dapat menggambarkan keadaan masyarakat, permasalahan dan kemungkinan dalam pemecahannya.

Identitas kelompok dapat diperkuat karena keluar batas batas kelompok, sehingga identitas kelompok mempersatukan kelompok untuk dapat bereksistensi. Menurut Simmel, kondisi konflik mempertahankan sistem sosial yang utuh dengan menciptakan keseimbangan antarkelompok:

1. Mengeluarkan perasaan permusuhan langsung terhadap musuh atau sumber frustrasi/konflik.
2. Menggantikan curahan rasa permusuhan kepada obyek pengganti.
3. Kegiatan pelepasan ketegangan memberi kepuasan tanpa memerlukan sasaran atau obyek pengganti.

Di sini digambarkan bahwa kesempatan untuk mengekspresikan sikap agresif merupakan suatu kepuasan. Karena itu kebutuhan akan pranata *safety-valve* meningkat dengan derajat di mana sistem sosial tidak mengizinkan ekspresi antagonistik. *Safety-valve* adalah pranata yang memberikan saluran rasa permusuhan dan mencegah pecahnya konflik. Dengan demikian konflik mempertahankan struktur sistem sosial, tetapi dapat juga menjadikan kondisi disfungsional bagi sistem sosial atau para pelaku. Pranata *safety-valve* membantu mempertahankan sistem dengan mencegah konflik atau kemungkinan konflik atau dengan mengurangi akibat akibat yang merusak Caranya ialah dengan memberikan obyek pengganti.

Berdasarkan pengertian di atas, maka konflik sosial akan meliputi spektrum fenomena sosial yang cukup lebar, yang di antaranya:

1. Kelas sosial-ekonomi, berkaitan dengan pola kekuasaan dalam hubungan produksi.
2. Etnik dan ras, berkaitan dengan persoalan identitas yang berkembang kepada semangat komunalisme.
3. Agama.
4. Konflik-konflik antarkomunitas, dalam banyak hal *agrarian based conflict* bisa terjadi pada wilayah ini.

Bentuk-bentuk pendekatan yang digunakan dalam konflik sosial dapat menjelma menjadi beragam bentuk aksi yang antara lain dikenal sebagai, (1) kerusuhan dan huru-hara, (2) pemberontakan, (3) revolusi, (4) pemogokan dan aksi membuat gangguan umum, (5) demonstrasi, (6) protes bersama, dan lain-lain.

Perkembangan yang terjadi di Mimika, di mana kehadiran PT Freeport merupakan hal yang sangat fenomenal, menunjukkan bahwa protes merupakan indikasi adanya konflik, dan konflik terjadi karena ketidakseimbangan di dalam distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. Pada satu pihak terjadi konsentrasi kekuasaan dengan segala keberuntungan yang mengikutinya, di lain pihak terjadi ketidakberdayaan dengan segala penderitaannya. Bila konflik tidak segera diatasi atau ditangani, dapat melahirkan gerakan-gerakan mulai dari aksi-aksi kolektif sampai gerakan terorganisir, yang disebut gerakan sosial.

Interaksi antara budaya global melahirkan berbagai persoalan bagi masyarakat lokal karena belum siap untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan baru. Nilai-nilai, cara berpikir, dan perilaku sosial di antara dua kebudayaan itu sangat kontras, sehingga pertemuan antara keduanya menimbulkan benturan budaya. Dalam setiap benturan, maka yang akan menderita adalah yang lemah posisi maupun strukturnya. Pihak yang lemah selalu menjadi korban, sedangkan yang kuat tetap tegar. Dalam keadan bingung dan kesulitan untuk memposisikan diri muncullah kekuatan untuk bertahan dengan segala daya akaliah yang dimilikinya, serta

melahirkan keuletan untuk mengubah keadaan yang dialaminya. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk protes, baik secara fisik maupun verbal.

Protes diarahkan kepada yang lebih kuat atau yang dominan, oleh pihak yang lemah. Dalam kasus Freeport, pihak yang kuat adalah Freeport didukung oleh pemerintah dan kekuatan bersenjata. Protes dan konflik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di mana protes merupakan manifestasi dari konflik (meskipun tidak selamanya konflik ditanggapi dengan protes). Protes adalah ekspresi dari ketidaksetujuan atas suatu keadaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kolektif secara terbuka. Ini berarti, di balik protes ada konflik antara pihak yang memprotes dengan yang diprotes. Konflik akan berakhir apabila ditemukan jalan tengah atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkonflik yang memuaskan kedua belah pihak. Sebaliknya, konflik akan terus berlanjut, kalau kesepakatan tidak dicapai atau ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah disetujui.

Benturan-benturan antara dua kebudayaan ini terjadi karena masyarakat asli tidak disiapkan lebih dulu untuk menghadapi nilai-nilai baru yang dibawa oleh proyek modern. Persiapan-persiapan yang dilakukan semata-mata bersifat fisik, sedangkan aspek manusianya ditinggalkan. Perencanaan pembangunan yang menekankan pada aspek ekonomi menciptakan ketidakseimbangan antara perkembangan fisik dengan kebudayaan sehingga terjadilah ketertinggalan budaya (*cultural lag*).

Dalam kasus Freeport pemanfaatan lahan milik adat menyebabkan para petani tersingkirkan bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara budaya. Secara ekonomi, mereka tidak leluasa lagi memanfaatkan tanahnya sesuai dengan tradisi bertaninya, sedangkan untuk ikut arus perubahan cara produksi dalam sistem kapitalis tidak memenuhi syarat. Akibatnya, dalam satu kawasan pertanian terjadi dualisme ekonomi, pada satu sisi ada sistem ekonomi subsisten yang diselenggarakan oleh petani, pada sisi lain berlangsung perekonomian modern (lihat Scott, 1994).

Sikap kritis terhadap upaya-upaya pembangunan merupakan hasil pembelajaran sosial setelah mengalami berbagai benturan dengan kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tradisional. Solidaritas mekanis yang menggerakkan mereka menyebabkan pergerakan komunitas lambat karena harus selalu mempertimbangkan resiko sosial bagi kelompoknya untuk tetap menjaga keseimbangan. Oleh karena interaksi dengan dunia luar yang lebih dinamis tidak bisa dihindari, maka terjadilah ketegangan-ketegangan yang akhirnya mendorong mereka untuk memberontak.

Berdasarkan latar belakang dan ciri-ciri gerakan sosial yang terjadi, Singh (2001) secara garis besar membagi gerakan sosial dalam tiga tipe, yaitu tipe klasik, neo-klasik, dan gerakan sosial baru. Masing-masing tipe mempunyai tokoh, isu perjuangan, asumsi-asumsi dasar dan metode perjuangan yang berbeda satu sama lain dan ada pula unsur-unsur kesamaannya, sehingga suatu aktivitas kolektif dapat digolongkan sebagai gerakan sosial. Gambaran umum mengenai ketiga tipe tersebut dan perbandingannya dengan gerakan sosial yang terjadi di Mimika dapat dilihat pada bagan berikut:

Tipe-tipe Gerakan Sosial dan Perbandingannya dengan di Mimika (Ngadisah, 2003)

I. Tipe Klasik (K)				
Penyebab	Asumsi Dasar	Isu Perjuangan	Ciri-ciri	Metode
Konflik Ideologi Dominasi pemilik modal Deprivasi absolut	Pengelompokan manusia pada hakekatnya adalah pengelompokan kelas Masyarakat sebagai sistem (totalitas) Disorder adalah endemik pada setiap sistem sosial	Mengubah struktur sosial yang menindas buruh Perjuangan kelas	Terikat pada ideologi Menekankan aspek ekonomi Menghasilkan “ <i>mean</i> ” Aktor: pekerja industri, petani Pengikut: dari kelas ekonomi tertentu (buruh)	Revolusi



II. Tipe Neo Klasik (NK)				
Penyebab	Asumsi Dasar	Isu Perjuangan	Ciri-ciri	Metode
Perubahan dalam sistem kolonial Deprivasi relatif Ketegangan struktural	Masyarakat sebagai sistem/totalitas yang teratur Masa-masa pembaharuan meningkatkan harapan, bila tidak terpenuhi timbul frustrasi	Revitalisasi budaya Pengembalian harga diri Turunnya “Ratu Adil” (milenarian)	Menggunakan kerangka dialektika Marxis Gerakan dilandasi oleh rangsangan-rangsangan emosional Perilaku spontan dalam <i>collective ction</i> Ada perlawanan terhadap kelas tertentu Aktor: bukan yang secara obyektif kekurangan	Pengerahan massa (<i>crowd, riot rebellion</i>)

III. Tipe Gerakan Sosial Baru (GSB)				
Penyebab	Asumsi Dasar	Isu Perjuangan	Ciri-ciri	Metode
Dominasi negara terhadap rakyat Ketidaksetaraan antar-kelompok Hubungan tidak seimbang antara negara, masyarakat-ekonomi	Semua kelompok mempunyai identitas yang harus dihargai dan dipertahankan Informasi adalah kekuasaan	HAM Ekologi Demokrasi Anti institusi Feminisme/ gender Egalitarian	Tidak mengikatkan diri pada ideologi Trans nasional Aktor-aktor non-segmental Pengikut: “ <i>grass root</i> ” Menolak pendekatan “ <i>collective action</i> ” Menggunakan teknologi komunikasi canggih	Berorganisasi secara multi nasional Mobiliasi sumber Mencari akses-akses untuk mendukung perjuangan Menerapkan sistem managerial yang canggih

TIPE MIMIKA

Penyebab	Asumsi Dasar	Isu Perjuangan	Ciri-ciri	Metode
Konflik dengan proyek industri modern Kesenjangan penduduk asli dengan pendatang Deprivasi relatif Ketegangan struktural Kebijakan pemerintah kurang memperhatikan masyarakat asli (<i>top down</i>) Sejarah sosial/tradisi perang suku	Hak-hak tradisional harus dikembalikan Penduduk asli ibarat pemilik rumah yang harus mengatur pendatang (sebagai penguasa) Pembaharuan tetap dalam keseimbangan	Revitalisasi budaya Pengembalian harga diri Turunnya “Ratu Adil” (gerakan Koreri) Hak asasi manusia Demokratisasi Ekologi Egalitarian	Terikat pada kepercayaan tradisi (menjadi semacam ideologi) Dilandasi oleh rangsangan-rangsangan emosional Perilaku spontan dalam “ <i>collective action</i> ” Ada perlawanan terhadap “kelas” tertentu Aktivitas berpusat pada pimpinan Menggunakan berbagai macam isu perjuangan Aktor-aktor segmental Perjuangan etnis	Berorganisasi Membangun akses dengan dunia internasional Memanfaatkan situasi politik nasional

Dari bagan di atas terlihat bahwa gerakan sosial di Mimika merupakan kombinasi tipe Neo Klasik dan Gerakan Sosial Baru. Berbagai unsur dari gerakan-gerakan sosial yang ada telah diserap atau secara kebetulan memang mempunyai kesamaan dengan gerakan sosial di Mimika. Satu hal yang paling mendasar dari kesamaan itu, yang melandasi terjadinya gerakan sosial adalah adanya konflik. Konflik bisa terjadi antarideologi, antarkelompok sosial, maupun antara negara dengan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Penduduk dan Mata Pencahariannya

Kabupaten Mimika terletak di bagian selatan Provinsi Papua. Kabupaten ini semula adalah bagian dari Kabupaten Fakfak dan dimekarkan sebagai kabupaten administratif pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000, Mimika beralih status menjadi kabupaten, yang berarti menjadi daerah otonom (Ngadisah, 2003).

Luas Kabupaten Mimika 19.592 km² atau 4, 77% dari luas Provinsi Papua. Kabupaten ini terletak di antara 4^o 30 – 4^o 44 LS dan 136^o 36 – 136^o 48 BT. Jumlah penduduk Kabupaten Mimika berdasarkan pendataan Pemilihan Umum 1999 berjumlah 90.518 orang, yang terdiri dari 56.004 laki-laki dan 34.514 perempuan. Penduduk itu tersebar pada empat kecamatan yang terdiri dari 70 desa/kelurahan. Perincian jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 1999

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Agimuga	1.789	2.070	3.859	4,26
2	Mimika Barat	3.575	4.216	7.791	8,61
3	Mimika Timur	4.661	5.274	9.935	10,98
4	Mimika Baru	24.489	44.444	68.933	76,15
J u m l a h		34.514	56.004	90.518	100

Sumber: Kantor Kependudukan Setwilda Mimika

Penduduk asli Mimika terdiri dari berbagai macam etnis, namun etnis yang terbesar adalah Amungme dan Kamoro. Di samping itu ada etnis-etnis lain yang dianggap “pendatang” oleh kedua etnis tersebut di atas, yaitu Dani, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekari, Delem, Kupel, dan Ngamun.

Etnis Amungme mendiami wilayah bagian selatan pengunungan tengah Papua atau di bagian utara wilayah Mimika. Kesatuan wilayah tempat tinggal mereka disebut *Amungsa*. Sedangkan Etnis Kamoro, menempati wilayah bagian selatan, yang terdiri dari dataran rendah. Tanah *Amungsa* juga didiami oleh etnis-etnis lain, seperti Moni, Lani, Damal, Nduga, dan Ekari yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Mimika sekarang ini cukup beranekaragam seiring dengan perkembangan pemerintahan, perdagangan, dan pertambangan (Freeport).

Penduduk yang berdiam di Tembagapura dan Kualakencana, sebagian besar adalah karyawan Freeport yang berjumlah \pm 17.000 jiwa. Selebihnya terdiri dari pegawai negeri/TNI, petani/nelayan, dan pedagang/pengusaha. Penduduk aslinya, baik Amungme, Kamoro, dan etnis-etnis lain, sebahagian besar masih hidup dengan mata pencaharian meramu atau bertani, mencari makan dengan berburu, menangkap ikan, dan memanggur sagu.

Pola kehidupan meramu dan nomaden masih dijalankan oleh sebagian orang Kamoro, sementara orang Amungme kebanyakan sudah menetap dan berkebun dengan sistem ladang berpindah, beternak, dan berburu. Cara bertani tanpa mengolah tanah lebih dulu dijalankan oleh penduduk pegunungan, terutama orang Dani dan Ekari. Kebun mereka umumnya terletak di lereng-lereng gunung yang terjal, dan bahan makanan yang ditanam adalah *petatas* (ubi jalar), talas, dan sayur mayur.

Hasil penelitian UGM dan Freeport (1999) menyebutkan bahwa masyarakat Kamoro sekarang ini berada dalam masa transisi dari kehidupan masyarakat peramu nomadik ke masyarakat pertanian menetap. Sementara itu mereka hidup berdampingan dengan masyarakat modern yang berlangsung dalam kompleks pertambangan PT. Freeport sehingga terjadi *gap* yang dalam, yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian secara radikal, yang seringkali mengundang keputusan bagi masyarakat tersebut.

2. Nilai-nilai Sosial Budaya Etnis Amungme dan Kamoro

Meskipun ada puluhan suku-bangsa asli Papua yang berdiam di wilayah Mimika, namun dalam tulisan ini hanya dua suku-bangsa yang dijadikan obyek kajian, yaitu Amungme dan Kamoro, karena kedua suku-bangsa inilah yang terkena dampak langsung pembangunan proyek pertambangan Freeport.

a. Suku-bangsa Amungme

Orang Amungme mendiami dataran tinggi di kawasan Kabupaten Mimika sehingga mempunyai ciri-ciri budaya dataran tinggi (*highland*). Tempat tinggal mereka terpecah di beberapa lembah yang terletak di antara gunung-gunung yang terjal seperti Lembah Tsinga, Lembah Oea, Lembah Jila, Lembah Waa, Lembah Bella, dan lain-lain. Mereka pada umumnya percaya akan adanya roh-roh leluhur yang tetap mengawasi dan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa hidup manusia dan alam sekitarnya tidak terpisah dari roh-roh yang hidup di dalamnya. Manusia, alam dan roh leluhur mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga hubungan di antara ketiganya harus tetap dijaga agar selalu harmonis.

Mereka percaya bahwa Tuhan ada di langit dan di bumi, serta percaya adanya surga yang disebut *hai*. Pandangan mereka tentang alam, Tuhan, dan roh sebagai satu kesatuan yang melingkupi kehidupan manusia merupakan manifestasi ajaran monisme yang mempunyai makna positif dalam upaya pelestarian alam. Manusia adalah bagian dari alam sehingga kalau ia merusak alam berarti merusak diri sendiri. Ditambah lagi orang Amungme mengidentikkan alam dengan orangtua, tanah dianggap sebagai Ibu dan gunung adalah Bapak.

Tanah yang mereka ibaratkan sebagai Ibu mempunyai bagian-bagian tertentu yang merupakan cerminan tubuh Ibu. Daerah pantai diibaratkan kaki ibu, dataran tempat mereka berkebum adalah badan ibu, dan puncak gunung adalah bagian kepala ibu (Beanal, 2000: 9). Ini berarti, menghormati alam sama dengan menghormati ibu. Pandangan ini mempengaruhi sikap orang Amungme terhadap eksplorasi tambang yang ada di puncak gunung dalam sikap terhadap dampak lingkungan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Suku-bangsa Kamoro

Orang Kamoro berdiam di dataran rendah wilayah Kabupaten Mimika, sehingga mereka memiliki corak budaya dataran rendah (*lowland*). Kampung-kampung yang mereka diami adalah Mapurunjaya, Koperapoka, Mamako, Hiripao, Kongapu, Mwapi, Nawaripi, Iwaka, Miako, Aikawapuka, Keakwa, Tiwaka, Atuka, dan Nawaripi. Kampung dan desa-desa tersebut, kecuali Nawaripi dan Koperapoka terletak di pinggiran dan di tengah-tengah hutan dekat aliran sungai. Sedangkan Nawaripi dan Koperapoka terletak di dalam Kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika.

Orang Kamoro pada umumnya memandang tanah sebagai *dusun* atau “tanah tumpah darah”, yang berarti bahwa tanah dapat menyimpan berbagai macam sumber daya alam, baik pada wilayah pantai, sungai, maupun dusun yang harus diwariskan secara turun temurun oleh *taparu* (klen). Seperti halnya orang Amungme, orang Kamoro juga mensakralkan alam. Tanah diibaratkan sebagai ibu dan tanah itulah yang memberikan nafas kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu, orang Kamoro yang tidak memiliki tanah, dianggap sebagai anak yatim piatu yang selalu hidup murung, tanpa daya. Karena kedudukannya yang suci itu, orang Kamoro tidak mengenal adanya jual-beli tanah. Tanah yang merupakan warisan leluhur harus dilestarikan dan diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Melepaskan hak atas tanah berarti memutuskan hubungan dengan tanah leluhurnya.

Dalam hubungannya dengan tanah, pandangan orang Kamoro tidak jauh berbeda dengan orang Amungme. Beberapa hal yang mengandung persamaan di antaranya adalah, pertama, mengibaratkan tanah dengan Ibu, **kedua**, tidak mengenal hak milik perorangan, melainkan hak ulayat dan **ketiga**, adanya zona-zona penggunaan tanah, yaitu zona pemukiman/perkampungan, zona pertanian, dan zona penyangga (Ngadisah, 2003: 60).

3. Kehadiran PT Freeport Indonesia di Mimika

PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah perusahaan modal asing yang sahamnya dimiliki oleh Freeport – Mc Mo Ran Cooper & Gold Inc (81,28%), PT. Indocopper Investama Corporation (9,36%), dan Pemerintah Republik Indonesia (9,36%). PTFI mengoperasikan tambang tembaga, emas, dan perak dalam jumlah besar di wilayah Kabupaten Mimika, Papua. Meskipun lokasi berada di sekitar Gunung Biji dan Gunung Rumpit, namun wilayah kontrak kerja meliputi kurang lebih sepertiga wilayah Mimika. Hal ini disebabkan kegiatan proyek mencakup pula pengapalan, pengolahan limbah, pembangunan jalan, dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas penambangan.

Penemu pertama biji tembaga di Ertsberg (Gunung Biji) adalah seorang ahli geologi Belanda bernama Jean Jacques Dory, pada tahun 1936. Kemudian pada tahun 1986, pada saat kandungan tembaga sudah mulai menipis, ditemukan sumber penambangan baru yang lebih besar, yakni di puncak Gunung Rumpit (Grasberg). Endapan tambang yang berada di wilayah ini disebut oleh Mealey (1986) sebagai penambangan tembaga terluas dan terbesar pada endapan yang paling terpencil di dunia. Karena letaknya yang sangat sulit dijangkau ini, pembangunan infrastruktur menjadi sangat besar, serta untuk pengelolaan keseluruhan proyek diperlukan teknologi tinggi.

PT Freeport Indonesia mulai melakukan pengeboran eksplorasi di Ertsberg pada bulan Desember 1967, berdasarkan kontrak karya I (KK I) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 1967. Pada tahun 1969 operasi penambangan dimulai. Pada saat itu, daerah lokasi pertambangan masih sangat sulit dijangkau, namun di sana sudah ada beberapa perkampungan kecil yang tersebar secara tidak merata, dihuni oleh penduduk yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Penduduk asli (orang Amungme) yang telah mendiami tempat tersebut mengklaim areal pertambangan sebagai tanah leluhur mereka. Mereka tidak hanya menganggap bahwa puncak gunung itu sebagai tanah miliknya, lebih dari itu, mereka menganggap bahwa itu adalah tempat suci, yang diibaratkan sebagai kepala Ibu (*Ninggok*) dan tempat bersemayam roh-roh suci. Puncak gunung adalah tempat yang sakral, yang selalu dipuji dalam doa, dan tempat kembalinya roh bila sudah meninggal.

4. Sikap Orang Amungme dan Kamoro Terhadap PT Freeport Indonesia

Pandangan hidup dan keadaan alam yang berbeda, yang melingkupi kehidupan orang Amungme dan Kamoro menyebabkan sikap mereka di dalam menghadapi PTFI dan kebijakan pembangunan pada umumnya berbeda. Masyarakat Amungme sangat keras sikapnya terhadap PTFI karena perusahaan ini dianggap telah mengeksploitasi kekayaan alam di puncak gunung dan merusaknya. Padahal tempat ini bagi masyarakat Amungme sangat sakral, bukan hanya dianggap sebagai kepala ibu, namun juga sebagai persemayaman para roh leluhur.

A. Sikap Orang Amungme

Orang Amungme melukiskan manusia berada di tengah-tengah alam dan hidup dari alam, sehingga ia harus memelihara hubungan yang harmonis dengan alam. Bahkan orang Amungme melihat dunia dan alam sekitarnya sebagai Ibu yang berdiri tegak dari utara ke selatan dengan pembagian: (1) Bagian Utara yang terdiri dari puncak-puncak gunung (daerah tempat tinggal roh leluhur suku Amungme) merupakan kepala Ibu (*Ninggok*), (2) Bagian Tengah (lereng-lereng gunung/lembah) adalah bagian badan Ibu (*Ndou*), tempat mencari penghidupan, (3) Bagian Selatan (dataran rendah) adalah kaki Ibu (*Ndok*), tempat yang indah dan subur, tempat bersemayam roh-roh jahat dan penyakit.

Orang Amungme percaya bahwa puncak gunung adalah tempat yang sakral, yang selalu dipuji dalam doa, dan tempat kembali rohnya bila sudah meninggal. Pandangan hidup seperti itu telah melahirkan sikap keras yang menentang eksploitasi kekayaan alam di puncak gunung

oleh perusahaan pertambangan Freeport. Apalagi perusahaan ini dianggap masuk tanpa permissi, yang berarti telah melanggar hak martabat orang Amungme, sekaligus menghancurkan dunia batin dan sumber orientasi dalam kehidupan mereka. Perasaan sakit hati tidak mudah diobati sehingga upaya-upaya yang dilakukan Freeport untuk menarik ke dalam lingkungan kehidupan pertambangan belum berhasil mengobati luka dan dukanya. Mereka tetap menganggap Freeport sebagai perampas tanah mereka, dan tidak mau menerima ganti rugi karena tanah leluhur tidak sewajarnya diperjualbelikan.

Faktor kedua yang mempengaruhi sikap keras orang Amungme adalah kebiasaan atau tradisi peperangan antarsuku. Secara tradisional, kehormatan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya memimpin perang, sehingga konsep “berperang” masih melekat pada tokoh-tokoh masyarakat adat Amungme. Dalam karakter sosial masyarakat yang didasarkan pada sistem perang suku, orientasi konflik masyarakat menjadi kuat, sehingga dalam berhubungan dengan dunia luar selalu melihat “siapa kawan siapa lawan” atau membentuk mentalitas perang. Mekanisme dan sistem konflik yang panjang telah berkembang membentuk sikap dan perilaku konfrontatif, yang merupakan unsur penting di dalam pertahanan hidup mereka yang keras.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terbentuknya sikap keras orang Amungme adalah lingkungan alam yang melingkupi kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang biasa hidup dalam alam lingkungan yang keras, penuh tantangan dan marabahaya, membuat sikap orang Amungme lebih ulet dan lebih dinamis dibanding orang Kamoro. Dinamika kehidupan yang tinggi dalam kelompok, bila dihadapkan dengan kelompok luar (*out group*) akan membawa kesan agresif.

5. Sikap Orang Kamoro

Orang Kamoro yang berdiam di dataran rendah mempunyai reaksi yang berbeda dengan orang Amungme dalam menanggapi kehadiran Freeport. Meskipun banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan kehadiran Freeport, mereka lebih banyak bertahan (tidak agresif). Mereka mempunyai cara pembebasan tersendiri bila mendapat tekanan dari luar, yakni berusaha menghindari.

Sikap kompromistis mereka lebih menonjol karena perkenalan dengan pendatang lebih lama dan lebih sering. Pada umumnya mereka berusaha menghindari konflik dengan orang-orang dari suku-bangsa yang sama, dan tidak ada sikap perlawanan terhadap suku-bangsa lain atau pendatang. Sikap yang kurang agresif ini mengakibatkan adanya hambatan dalam mengekspresikan diri, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Sikap bawaan kolektif etnis ini menyebabkan bentuk reaksi yang berbeda dengan etnis Amungme dalam menghadapi Freeport.

Sebagian besar orang Kamoro tidak suka terhadap Freeport karena telah merusak lingkungan yang merupakan sumber penghidupan orang Kamoro berupa sagu, sungai, dan sampan yang telah hancur. Alasan lain adalah karena telah merusak warisan Allah yang diberikan kepada orang Kamoro, sehingga mengakibatkan orang Kamoro kehilangan jati diri. Perasaan

tidak suka ini muncul setelah proyek beroperasi dan dampaknya kelihatan. Ini menunjukkan bahwa yang mereka tentang sebenarnya adalah dampak yang muncul dari proyek tersebut, bukan aktivitas pertambangannya. Berbeda dengan orang Amungme yang sejak awal sudah menentang karena Freeport dianggap telah merampas tanah hak ulayatnya.

Sebagian orang Kamoro dalam jumlah yang lebih sedikit bersikap “biasa-biasa saja”, artinya tidak senang dan juga tidak sedih. Alasan mereka karena mereka sudah diberi bantuan, walaupun tidak mencukupi. Mereka bersikap “senang tidak senang” karena mereka tahu bahwa meskipun Freeport telah merusakkan lingkungan hidup, namun upaya pembangunan rumah mereka oleh PT Freeport juga pantas dihargai.

Sementara itu, sebagian kecil orang Kamoro ada pula yang merasa senang dengan kehadiran Freeport karena mereka sekarang bisa hidup lebih tenang, aman, dan bahagia. Mata pencahariannya sebagai petani tidak terganggu dan tidak lagi pergi berburu atau meramu masuk hutan. Mereka yang merasa senang ini di antaranya adalah pamong desa (kepala dusun), yang mungkin dapat menikmati statusnya sebagai salah satu unsur pimpinan masyarakat.

6. Konflik Sosial Antara Penduduk Asli dan PT Freeport Indonesia

1. Dampak Sosial PT Freeport Indonesia

Dampak sosial sangat erat kaitannya dengan dampak lingkungan fisik, karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi, di samping karena pengaruh ide-ide, pengaruh fisik juga tidak dapat diabaikan peranannya. Dampak sosial PTFI terhadap masyarakat Amungme lebih mendalam dibanding masyarakat Kamoro, meskipun keduanya memiliki dasar filsafat alam yang sama, yakni menganggap adanya kesatuan antara alam manusia dengan alam semesta (lingkungan fisik). Hal ini disebabkan, kerusakan alam akibat penambangan bagi orang Amungme ada di puncak gunung yang merupakan tempat pemujaan, tempat suci, dan tempat arwah leluhur orang Amungme.

Tempat itu kini sudah dihancurkan orang, tanpa permisi, tanpa minta izin atau berunding dulu dengan pemiliknya. Sikap itulah yang dianggap melukai hati orang Amungme. Mereka menganggap bahwa pihak Freeport tidak menghargai hak-hak orang Amungme dan tidak menempatkan mereka “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Air sungai yang bercampur *tailing* (pasir sisa yang dihasilkan dari kegiatan penambangan PTFI) juga membuat mereka bertambah sedih, karena dulu airnya jernih, sebagai lambang air mata ibu yang dipancarkan dari puncak gunung. Itulah gambaran kesedihan orang Amungme atas kerusakan lingkungan tanah ulayat mereka, yang bukan sekedar mempengaruhi kehidupan dari segi ekonomi, tetapi menyangkut dunia batin orang Amungme.

Memang secara ekonomi, mereka sudah mengenal cara bercocok tanam secara menetap pada lereng-lereng gunung. Dengan adanya akses jalan yang dibangun PTFI mereka dapat memasarkan hasil bumi ke kota. Rumah-rumah dan sarana pendidikan cukup lengkap, beberapa di antaranya dapat bekerja di PTFI. Pemukiman orang Amungme di Kwamki Lama cukup memadai yang dibangun dengan dana rekognisi dari PTFI. Meskipun demikian luka hati

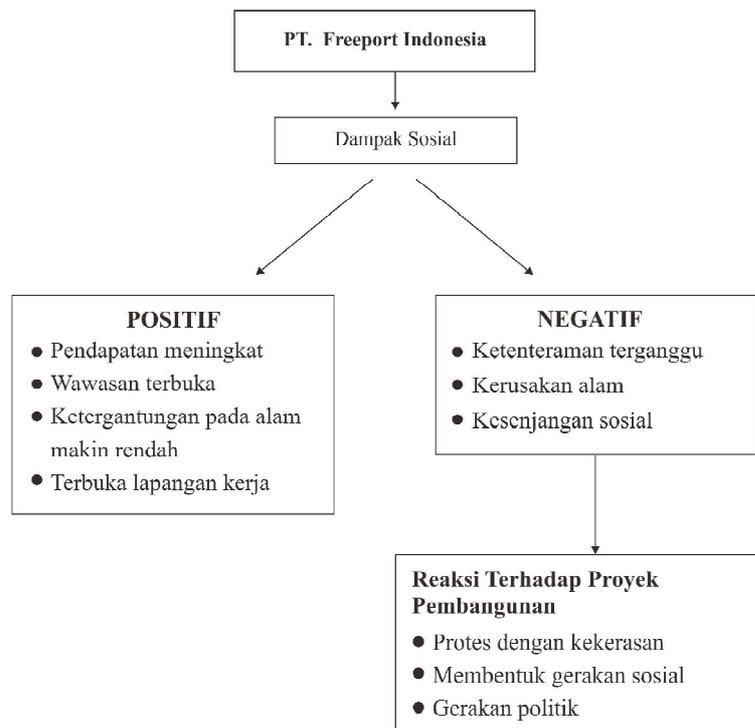
nampaknya belum terobati, sehingga protes-protes yang paling gencar dilakukan oleh orang Amungme, sejak awal PTFI beroperasi sampai sekarang.

Sementara itu, orang Kamoro nampak lebih kompromistis meskipun secara ekonomi kehidupan mereka lebih banyak terganggu, karena dunia spiritualnya tidak terlukai. Kalaupun ada luka hati, tidak separah orang Amungme, karena lebih menyangkut aspek kehidupan ekonomi, bukan religi. Hal yang sama-sama dialami adalah, adanya pergeseran adat-istiadat dan banyak menyesuaikan dengan kehidupan modern. Sebagian mereka sudah menyadari akan arti pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk mengejar kemajuan bagi generasi baru, meskipun kedisiplinan bersekolah belum dihayati benar oleh sebagian orangtua maupun anak-anaknya.

Dalam hubungannya dengan pendatang, dampak yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap sikap penduduk asli terhadap PT Freeport dan pegawai-pegawainya adalah adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Masyarakat asli yang belum memperoleh kesempatan memiliki rumah yang disediakan PTFI secara fisik sangat kontras penampilannya. Apalagi bila dibandingkan dengan kehidupan di Kuala Kencana dan Tembagapura yang merupakan duplikasi kota modern di Amerika Serikat (Ngadisah, 2003).

Bagi penduduk disekitarnya, Freeport nampak sangat berkuasa sehingga orang cenderung menjauhkan diri darinya atau tetap mengikutinya sambil protes. Freeport beroperasi dengan suatu pola kerja dan pada tingkat pengambilan keputusan yang sama sekali di luar jangkauan dan di luar daya tangkap penduduk asli yang merasa sebagai “tuan rumah” dan pemilik tanah. Dengan kehidupan statis yang sudah dijalannya turun-temurun, tentu sangat sulit baginya untuk menempatkan diri di tengah-tengah perubahan yang sangat pesat akibat proses industrialisasi yang dimanifestasikan oleh Freeport.

Dampak Sosial Kehadiran PT Freeport Indonesia



2. Sumber-sumber Konflik di Mimika

Konflik bagi masyarakat di kawasan Mimika merupakan hal yang biasa, yang ditunjukkan dengan kebiasaan perang suku dan pergantian kepemimpinan yang sering terjadi. Kehadiran PTFI dapat dikatakan menjadi sumber konflik baru, karena konflik-konflik lama masih mewarnai kehidupan sosial masyarakat dan Freeport menambah kompleksitas konflik di daerah ini.

Kegiatan PTFI yang merupakan perusahaan multinasional yang sangat modern peralatannya menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat di kawasan Kabupaten Mimika. Ini berarti faktor-faktor materiil nampak lebih nyata pengaruhnya terhadap perubahan sosial, karena penggunaan alat-alat canggih memerlukan prasarana yang memadai dan penyesuaian sikap mental manusianya. Apalagi dengan adanya perubahan lingkungan hidup yang berpengaruh langsung terhadap sumber mata pencaharian penduduk, diperlukan perubahan nilai secara signifikan agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup.

Perubahan yang demikian cepat melahirkan konflik-konflik sosial yang makin tajam, karena ketegangan meningkat. Meningkatnya ketegangan disebabkan situasi sosial yang telah ada sudah mengandung potensi konflik berupa persaingan dan tradisi peperangan antarsuku. Sebagai perusahaan modern PTFI dituntut untuk bertindak secara rasional, sedangkan masyarakat sekitar masih sangat tradisional. Sementara itu perubahan-perubahan tidak terhindarkan sehingga masyarakat adat makin sulit beradaptasi dengan situasi maupun nilai-nilai baru. Akhirnya, perubahan dan konflik berjalan beriringan sebagai suatu kenyataan yang tidak terhindarkan, yang dipicu oleh kehadiran PTFI.

Proses terjadinya konflik dapat dilihat dari tahap awal perencanaan penambangan sampai tahap operasional dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setelah proyek berjalan. Tahap perencanaan umum dapat ditelusuri sejak ditandatanganinya kontrak karya I pada tahun 1973 antara pemerintah RI dengan PTFI, sedangkan dalam kaitannya dengan masyarakat setempat ditandai dengan *January Agreement* (1974), sebagai upaya Freeport untuk berdamai dengan masyarakat. Selama lebih kurang 20 tahun PTFI beroperasi, dengan segala pasang surutnya, perusahaan ini seolah-olah tidak peduli terhadap masyarakat disekitarnya. Baru setelah ada peristiwa kerusuhan bulan Maret 1996, kebijakan-kebijakan PTFI diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun Papua pada umumnya. Langkah nyata ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan penyediaan dana 1% dari keuntungan kotor, yang diwujudkan melalui berbagai program. Kebijakan ini ternyata belum mampu meredam konflik yang sudah lama terpendam, bahkan menjadi sumber konflik baru.

3. Protes Masyarakat Terhadap PT Freeport Indonesia

Protes masyarakat terhadap PTFI sudah berlangsung sejak awal berdirinya PTFI, yakni pada waktu persiapan proyek. Protes berlanjut sampai sekarang, karena konflik yang menjadi penyebab protes tidak diatasi secara tuntas. Di samping karena faktor dampak dan kebijakan PTFI yang merugikan kelompok tertentu, ada pula faktor internal yang menyebabkan protes berlangsung terus, bahkan mengarah pada gerakan sosial politik. Faktor internal yang dimaksud adalah kemajemukan masyarakat Mimika, karena beranekaragamnya pendatang dengan budaya

masing-masing, masyarakat asli merasa terpojok. Kenyataan ini dihadapi dengan memperkuat ikatan emosional ke dalam, sambil mengambil jarak dengan pendatang. Sikap ini merupakan indikasi bahwa ada resistensi penduduk asli terhadap pendatang.

Perlawanan itu muncul karena kelompok-kelompok kepentingan yang dominan yaitu pemerintah dan PTFI yang membawa arus pendatang ke daerah Mimika dianggap telah memarginalisasi penduduk asli. Perasaan terancam, ditambah dengan penyelesaian konflik yang tidak memuaskan penduduk asli dalam kasus-kasus dengan PTFI maupun pemerintah, merupakan penyebab utama timbulnya protes dalam berbagai bentuk.

Bentuk-bentuk protes yang dilakukan penduduk asli dimulai dari protes-protes fisik seperti pencabutan patok-patok di kawasan pertambangan, merusak fasilitas fisik milik PTFI dan penyanderaan mobil, dan yang terbesar dari segi jumlah kerugian adalah kerusuhan Mimika pada bulan Maret 1996. Gerakan-gerakan kolektif secara fisik, oleh orang Amungme dianggap tidak efektif, sehingga Kepala Suku Besar Amungme (Tom Beanal) membentuk organisasi Lemasa yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat setempat. Lembaga tersebut merupakan embrio terbentuknya gerakan sosial di Mimika.

Bila ditelaah secara mendalam, penyebab terjadinya protes yang dilakukan oleh penduduk asli dapat diidentifikasi sebagai berikut (Ngadisah, 2003: 149):

1. Keinginan untuk bekerja di PTFI namun ditolak (tidak memenuhi syarat).
2. Karyawan yang ditegur karena tidak disiplin, kemudian mengamuk dan melibatkan kelompoknya.
3. Persaingan antar karyawan, terutama penduduk asli dengan pendatang.
4. Ada penggerak dari luar karena mempunyai kepentingan tertentu.
5. Ada perasaan "*in group*" yang kuat dari kelompok etnis tertentu.
6. Penyelesaian konflik yang tidak pernah tuntas.
7. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat (terutama hak atas tanah).
8. Perbedaan persepsi tentang konsep pemilikan tanah antara PTFI/pemerintah dengan masyarakat.
9. Kehadiran tentara sebagai tameng perusahaan.
10. Keberadaan masyarakat asli seolah-olah diabaikan (tidak pernah diajak bicara/berunding dalam setiap pengambilan keputusan PTFI).

Dari 10 butir penyebab langsung yang dapat memicu protes, bila diambil kesimpulan umum adalah karena rasa tidak senang masyarakat terhadap PTFI, baik yang menyangkut cara-cara atau proses pembangunan proyek pertambangan, kebijakan-kebijakan setelah proyek mulai beroperasi maupun penanggulangan terhadap dampak yang dihasilkan oleh operasi tambang PTFI. Dari ketiga tahap tersebut, yang nampak erat kaitannya dengan aksi protes penduduk asli adalah tahap pertama dan kedua. Meskipun dampak berupa kerusakan lingkungan akibat limbah demikian hebat, namun protes yang dilakukan secara langsung karena menuntut perbaikan lingkungan bukan dilakukan oleh penduduk setempat, tetapi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Penduduk asli mungkin merasa sama sekali tidak berdaya atau secara kebetulan yang terkena limbah adalah masyarakat Kamoro, yang

lebih bersikap “*nrimo*” dibandingkan penduduk asli lainnya di Papua.

Faktor lain yang juga dirasakan sangat meresahkan bagi penduduk asli adalah kebijakan penerimaan pegawai pada PTFI. Penduduk asli yang menjadi karyawan Freeport hanya sekitar 10% dari keseluruhan karyawan, sehingga menimbulkan perasaan “terjajah” dan pelecehan harga diri di kalangan penduduk asli. Alasan yang diberikan perusahaan mengenai terlalu sedikitnya penduduk asli yang dilibatkan, di samping pendidikan/ketrampilan yang rendah, disiplin kerjanya juga rendah. Sementara itu, masyarakat beranggapan bahwa mereka mampu. Kalaupun tidak mampu, dapat dicarikan tempat yang paling sesuai, asalkan dapat menjadi pegawai tetap, bukan sebagai buruh harian. PTFI seharusnya dapat menerapkan persyaratan yang lebih longgar dalam penerimaan pegawai, khususnya bagi penduduk asli. Persyaratan ketat yang diberlakukan PTFI hanya akan menambah kesenjangan antara pekerja dari luar dan masyarakat lokal yang merupakan bom waktu bagi PTFI maupun pemerintah untuk memicu terjadinya gejolak dan agresi massa. Masyarakat lokal memang memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara hidup modern atau cara kerja perusahaan.

Dengan melakukan protes, penduduk asli ingin menyatakan diri secara penuh dalam tatanan sosial baru. Selama ini penduduk asli, khususnya orang Amungme merasa keberadaannya sebagai suatu etnis, hak-hak adat dan kesatuan etnisnya dengan seluruh sumberdaya lingkungannya tidak diakui. Mereka mempertanyakan eksistensinya yang sama sekali tidak dihargai dan tidak pernah dilibatkan dalam proses perundingan-perundingan sebelum konsesi-konsesi dengan perusahaan dibuat. Mereka mempertanyakan, mengapa mereka dikorbankan, seakan-akan mereka tidak ada, demi terlaksananya pengoperasian pertambangan. Perasaan-perasaan mereka ini diungkapkan oleh pimpinan Lemasa yang menganggap hal-hal tersebut sebagai sumber segala kerusakan dan konflik dengan Freeport.

4. Perkembangan Protes Menjadi Gerakan Sosial Politik

Protes yang merebak dalam berbagai bentuk dan kesempatan, mungkin akan berhenti bila direspon dengan cara yang tepat, sesuai dengan keinginan para aktor. Akan tetapi, di Mimika yang terjadi tidak demikian. Di samping cara merespon yang keliru, faktor-faktor lain juga sangat berpengaruh, sehingga protes akhirnya berkembang menjadi gerakan sosial, bahkan pada akhirnya berkolaborasi dengan gerakan politik. Oleh karena tidak dapat disebut sebagai gerakan politik murni, maka perkembangan terakhir dari gerakan sosial di Mimika dapat disebut sebagai gerakan sosial politik.

Proses perkembangan itu sesungguhnya meliputi perubahan-perubahan dalam hal bentuk gerakan, lokus gerakan, dan sifat gerakan. Dilihat dari segi bentuk, terjadi “*methamorphose*” dari gerakan tanpa bentuk (*amorph*) menjadi gerakan terorganisir, dari segi lokus terjadi perluasan dari Amungsa (tempat tinggal orang Amungme) sampai Jakarta, bahkan sampai ke tingkat internasional, dan dari segi sifat-sifat gerakan, berkembang dari gerakan rekognitif ke gerakan politik/instrumentalis.

Perubahan yang jelas dari sifat gerakan ini adalah pada saat pimpinan Lemasa bergabung dengan Presidium Dewan Papua (PDP), yang tujuan pergerakannya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam PDP, bergabung berbagai pemimpin gerakan yang berasal dari Mimika seperti Kelly Kwalik dan Fedelis Songgonanau (penggerak kerusuhan Timika 1996). Pada kongres PDP kedua, Tom Beanal (ketua Lamasa) terpilih sebagai Wakil Ketua PDP.

Selain itu Tom Beanal juga menjadi salah seorang anggota tim yang menghadap Presiden Habibie untuk berdialog tentang Papua. Di samping manuver pada tingkat nasional dan internasional, penggalangan massa di wilayah Mimika juga dilakukan dengan mensosialisasikan ide Papua merdeka secara damai.

Di luar itu, berkembang pula gagasan untuk pemerintahan dengan model otonomi yang seluas-luasnya, sehingga terjadi polarisasi gerakan. Satu pihak ingin merdeka, pihak yang lain ingin otonomi luas. Di antara keduanya, ada yang beranggapan bahwa bisa menerima otonomi luas dengan catatan, sebagai persiapan untuk mencapai kemerdekaan. Respon pemerintah atas tuntutan itu adalah menyelenggarakan dialog yang lebih intensif dan mempersiapkan konsep otonomi khusus. Pilihan pemerintah ini dianggap jalan tengah untuk memberi kebebasan bagi masyarakat Papua untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat, asal tetap berada dalam NKRI.

Sejak gerakan-gerakan politik ini muncul, tuntutan terhadap Freeport nampak mengendor, bahkan ada upaya untuk memanfaatkan Freeport sebagai sumber kekuatan gerakan. Dengan masuknya Tom Beanal sebagai salah seorang komisaris Freeport, akses dana maupun jaringan ke luar negeri menjadi lebih besar. Ini menunjukkan adanya proses pemusuhan menjadi “kawan” dengan tujuan untuk mendukung perjuangan politik sekaligus sebagai jembatan untuk promosi kepemimpinan seorang kepala suku besar atau kepala lembaga adat. Proses ini dapat disebut sebagai instrumentalisasi, yang juga merupakan bagian perubahan dari sifat gerakan yang bersifat rekognitif menjadi politis instrumentalis.

7. Pengelolaan Konflik yang Terjadi di Mimika

Suatu konflik sebetulnya tidak perlu dihindari, tetapi harus dikelola dengan baik. Konflik tidak akan pernah hilang, yang ada hanyalah orang-orang yang terlibat di dalamnya mengurangi kepentingannya. Konflik yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai; (1) konflik memungkinkan kita untuk mengetahui posisi lawan kita sehingga kita dapat mengambil tindakan sesuai dengan yang dikehendaki, (2) konflik juga dapat mendorong munculnya norma-norma baru yang berlaku umum, (3) konflik justru bisa memperkuat sebuah struktur kekuasaan, (4) konflik menjadikan kita tahu batas-batas dari kelompok atau komunitas lain, (5) konflik justru bisa membuat sebuah ikatan antara kelompok-kelompok yang semula justru lepas satu sama lainnya, dan (6) konflik bekerja sebagai stimulan untuk mengurangi stagnasi.

Setiap masyarakat pada dasarnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dalam arti luas. Akan tetapi, perubahan lingkungan yang berlangsung amat cepat

pada hampir semua sektor kehidupan dapat mengaburkan orientasi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian hanya sebagian kecil warga yang mampu menanggapi tantangan dengan bekerja keras, sedangkan sebagian besar cenderung melarikan diri dari kenyataan atau melakukan perlawanan dengan kekerasan. Kurangnya kesiapan masyarakat untuk menanggapi tantangan yang timbul akibat meningkatnya kegiatan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan organisasi sosial ataupun tradisi yang mempengaruhi sikap dan pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, aspek sosial tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Aspek sosial justru harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan yang juga diperhitungkan sebagai biaya sosial (*social cost*). Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakatnya harus disiapkan lebih dulu, sehingga mampu berpartisipasi pada setiap tahap pembangunan.

Protes yang dilakukan oleh penduduk asli di Mimika yang paling utama bukanlah menuntut ganti rugi materi, tetapi penghargaan atas eksistensinya sebagai manusia. “Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” merupakan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan melalui gerakan sosial dan politik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sosial yang dianut masyarakat adat. Sebagai pihak yang masih berat beradaptasi dengan dunia modern yang penuh persaingan, sangatlah wajar, bila masyarakat adat diberi perlindungan (proteksi) agar tidak terlindas oleh gerak pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan orang modern. Caranya, dengan “mengembalikan” lingkungan hidup yang utuh agar masyarakat adat mampu bekerja sesuai dengan habitatnya, sambil dibina dan dibimbing untuk menyesuaikan dengan kehidupan modern secara perlahan-lahan. Pendidikan harus diberikan dan persyaratannya dipermudah, demikian pula untuk memasuki dunia kerja.

Sikap pemerintah yang lebih berpihak pada pemilik modal dalam membangun, dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi, memunculkan sikap agresif dari masyarakat lokal karena merasa diperlakukan tidak adil, sehingga timbul rasa ketidakpercayaan pada pemerintah. Untuk mengembalikan kepercayaan pada pemerintah, para pengambil kebijakan harus memperbaharui komitmen bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk melayani dan mengayomi rakyat. Komitmen itu dimanifestasikan dalam bentuk “manajemen pamong” sebagai jatidiri manajemen pemerintahan. Berani berpihak kepada yang lemah, cepat tanggap, siap melayani dan menyelesaikan masalah sekecil apapun, adalah beberapa ciri dari manajemen pamong (Korten & Sjahrir, 1988).

D. PENUTUP

Konflik yang terjadi antara penduduk asli Mimika dengan PT Freeport Indonesia muncul karena adanya penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal. Sejak awal kedatangan Tim Survey Freeport sampai dengan proyek beroperasi, keberadaan masyarakat lokal diabaikan; tidak pernah diajak bicara atau diberi tahu tentang rencana Freeport menambang emas dan tembaga di atas lahan yang menurut adat setempat adalah milik masyarakat Amungme. Protes-protes fisik secara spontan sudah dilakukan untuk menentang kebijakan pembangunan proyek yang tidak adil karena tidak menghargai keberadaan dan hak milik masyarakat sekitar proyek, namun tanpa hasil.

Kebijakan yang ditentang adalah, perencanaan terpusat (dari Jakarta) atau “*top down planning*”, tanpa berunding dulu dengan masyarakat atau mendengar keinginan-keinginan masyarakat lokal. Bahkan pada saat kontrak karya kedua (1995), di mana masyarakat sudah puluhan tahun berontak, menuntut keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan lahan mereka, ternyata pemerintah pusat tetap tidak peduli. Pengikutsertaan masyarakat lokal dalam setiap perencanaan kebijakan adalah esensi terdalam tuntutan mereka, sebagai bentuk pengakuan dan kesederajatan mereka dengan warga negara lain.

Konflik yang terjadi di Mimika tidak mudah diatasi karena di samping ada potensi yang sangat besar tersimpan dalam masyarakat, kebijakan-kebijakan Freeport yang dimaksudkan untuk meredam konflik justru menjadi sumber konflik baru, karena lebih menekankan pendekatan ekonomi (dana 1%). Kebijakan ini juga melahirkan tuntutan-tuntutan baru karena banyak pihak yang tidak puas dengan cara pengelolaannya. Di samping itu, ada satu etnis yaitu orang Amungme yang tetap menolak dana 1%. Penolakan ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, karena yang paling berhak menerima dana 1% hanyalah orang Amungme dan Kamoro. Kedua, memberikan dana ibarat “melempar tulang” untuk diperebutkan.

Dalam kasus konflik yang terjadi di Mimika Papua, para penentu kebijakan dapat mengambil manfaat dari konflik yang telah terjadi. Manfaat yang dapat diambil oleh para penentu kebijakan tersebut di antaranya adalah (1) membangun dengan mengedepankan perencanaan sosial, yang merupakan kata kunci di dalam kebijakan pembangunan yang berkerangka budaya, (2) hargai masyarakat adat dengan model pembangunan partisipatif, memberi solusi berupa ganti rugi atau pemberian uang, ternyata tidak mampu menyelesaikan konflik atau menghentikan protes yang dilakukan masyarakat adat, karena kerugian sosial berupa penghargaan, rasa aman, dan kesederajatan dan hilangnya hak-hak tradisional belum dipulihkan, dan (3) membangun kembali kepercayaan kepada pemerintah dengan mengembangkan manajemen pamong, para pengambil kebijakan pada tingkat pusat sampai daerah harus memperbaharui komitmen bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk melayani dan mengayomi rakyat.

Dari segi teori, konflik yang terjadi di Papua membuktikan bahwa modernisasi perekonomian di tengah-tengah masyarakat tradisional dapat menimbulkan guncangan-guncangan sosial yang sangat kuat, sebagaimana terjadi pada masyarakat petani di berbagai negara pada saat mengalami proses peralihan dari tradisional ke modernitas. Masyarakat Jawa masa kolonial dengan masyarakat Papua era Freeport dan pemerintahan Orde Baru, mengalami ketegangan yang hampir sama. Mereka menyikapinya dengan lari ke pencarian “Ratu Adil” disertai dengan tindak kekerasan secara sporadis. Oleh karena dukungan teknologi informasi, gerakan “Ratu Adil” di Papua dapat diubah menjadi gerakan sosial yang modern, meskipun baru sebatas kulit. Gerakan sosial pada masyarakat tradisional sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya setempat, dengan figur pemimpin sebagai pusat kekuatan.

Pertanyaan lebih lanjut yang menarik untuk dikaji adalah, gerakan sosial di perkotaan, di mana adat istiadat tidak lagi dominan. Di manakah sebenarnya sumber kekuatan gerakan-gerakan sosial di perkotaan, apakah pada sang pemimpin, pada sumber dana (donatur) ataukah faktor-faktor lain seperti media masa dan teknologi informasi? Gerakan sosial di perkotaan

menjadi bahan kajian yang menarik karena dalam era reformasi, aktivitasnya sangat menonjol. Demikian pula peran penggerak yang tidak kelihatan (*invisible hand*) pada masa reformasi kehadirannya dapat dirasakan, namun tidak mampu dideteksi. Adalah tugas dari ilmuwan sosiologi untuk memberi penjelasan tentang aktivitas gerakan yang dikendalikan oleh tangan-tangan yang tidak nampak itu melalui penelitian yang seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Taufik Tuhana. 2001. *Mengapa Papua Bergolak?*. Gama Global Media. Yogyakarta.
- August, Kafiari & Tom Beanal. 2000. *PT Freeport Indonesia dan Masyarakat Adat Suku Amungme*. Forum Lorentz.
- Djamal, Murni (ed.). 2003. *Konflik Internal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian – Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Leiden-Jakarta.
- Hasanuddin, Lili (ed.). 2001. *Suara dari Papua: Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Papua Asli*. Yappika. Jakarta.
- Hatta, Meutia. 1991. “Proyek Pembangunan Pemindahan Kampung dan Stres pada Masyarakat Marunda Besar”. *Disertasi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- _____. 1973. *Protest Movement in Rural Java*. Oxford University Press. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- _____. 1984. *Ratu Adil*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1993. *Irian Jaya – Membangun Masyarakat Majemuk*. PT Gramedia. Jakarta.
- Korten, D.C. & Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mealey, George A. 1999. *Grasberg: Penambangan Tembaga dan Lumis di Pegunungan Irian Jaya pada Endapan yang Paling Terpencil di Dunia*. Freeport – Mc Moran Copper & Gold Inc, Indonesia.
- Melalatoa, M. Junus. 1997. “Silimo: Produk Peradaban Tua di Irian”. dalam *Sistem Budaya Indonesia*. PT Pamator. Jakarta.
- Ngadisah, 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Pustaka Raja. Yogyakarta.
- Pratikto, Fadjar. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Rauf, Maswardi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penajagan Teoretis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sariyun, Yugo. “Konflik Sosial di Sekitar LNG”. dalam *Wawasan*. Nomor 4 Tahun II/1980.
- Scott, James C. 1994. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- _____. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Sunario, Astrid S. Susanto. 1999. *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua Puluh Satu*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.